

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Tata Kelola IT

Disektor perbankan nasional, informasi dan teknologi yang mendukung proses bisnis mereka merupakan aset yang sangat berharga. Tetapi kurang dipahami oleh beberapa Bank nasional. Hal ini dibuktikan dengan peneliti yang terjun langsung ke sebuah Bank pembangunan daerah. Tidak ada standar operasional kerja yang didokumentasikan dengan baik terkait dengan TI.

Didalam sebuah eksekutif *summary* standar tata kelola TI internasional dikatakan bahwa perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang mengerti keuntungan dari teknologi informasi dan menggunakannya untuk mendapatkan sebuah nilai (*value*). Kebutuhan terhadap nilai TI, manajemen resiko TI, dan meningkatnya kontrol terhadap informasi sekarang baru disadari merupakan kunci dari tata kelola TI perusahaan. Pada dasarnya, TI merupakan tanggung jawab dari top manajemen. Oleh karena itu tata kelola TI akan semakin mudah diterapkan apabila didukung oleh top manajemen.

2.1.1 Definisi Tata Kelola TI

Mengingat banyaknya definisi dari tata kelola TI, maka penulis akan mengambil pengertian secara umum saja terhadap tata kelola yang diambil dari beberapa definisi yaitu

“IT governance is the term used to describe how those persons entrusted with governance of an entity will consider IT in their Supervision, monitoring, control and direction of the entity. How IT is applied within the entity will have an immense impact on whether the entity will attain its vision, mission or strategic goals.” (Robert s. Roussey, university of southern california).

“IT governance is the responsibility of the board of directors and executive management. It is an integral part of enterprise governance and consists of the leadership and organisational structures and processes that ensure that the organisation’s IT sustains and extends the organisation’s strategies and objectives.” (IT Governance Institute).

Jadi penulis mendefinisikan secara umum tata kelola TI adalah pengelolaan TI secara terstruktur untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan perusahaan dimana tanggung jawab pengelolaan berada di top eksekutif manajemen.

Secara fundamental, tata kelola TI berfokus pada 2 hal:

- Pengembalian sebuah *value* dari TI ke bisnis
Pengembalian *value* dari TI ke bisnis dikendalikan oleh strategi keselarasan antara TI dan bisnis.
- Mitigasi dari risiko TI.
Mitigasi dari risiko TI dikendalikan oleh *accountability* yang menempel pada *enterprise* perusahaan.

Keduanya harus di dukung oleh kualitas dan kuantitas sumber daya dan pengukuran-pengukuran yang dilakukan.

2.1.2 Lingkup (Domain) Tata Kelola TI

1) Keselarasan (*Alignment*)

Keselarasan TI mengandung pengertian adanya terhubungan antara operasi TI dengan operasi perusahaan dan hubungan tersebut menghasilkan kemampuan untuk memproduksi nilai bisnis.

2) *Delivery* Nilai

Prinsip dasar dari pembuatan nilai TI adalah menyampaikan tepat waktu, tetap pada anggaran semula, menghasilkan manfaat yang telah didefinisikan dan dijanjikan. Maka dari itu, desain dari TI harus efektif dan efisien.

3) Manajemen Sumber Daya

Manajemen sumber daya adalah segala sesuatu bentuk untuk mengoptimalkan investasi, manajemen sumber daya TI yang bersifat kritical seperti aplikasi, informasi, infrastruktur, dan manusia.

4) Manajemen Risiko

Semua risiko TI harus dimanajemen dengan baik. Untuk itu diperlukan sebuah kepedulian dari semua komponen perusahaan dan memahami resiko yang akan terjadi atau yang sedang terjadi.

5) Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menjejaki dan memonitor strategi implementasi, komplitnya proyek, penggunaan sumber daya, kinerja proses dan *service delivery*.

Berikut gambar Area Fokus Tata Kelola TI:



Gambar 2.1 Area Fokus Tata Kelola IT

Sumber: COBIT *Framework* 4.1

2.1.3 Kerangka Kerja COBIT

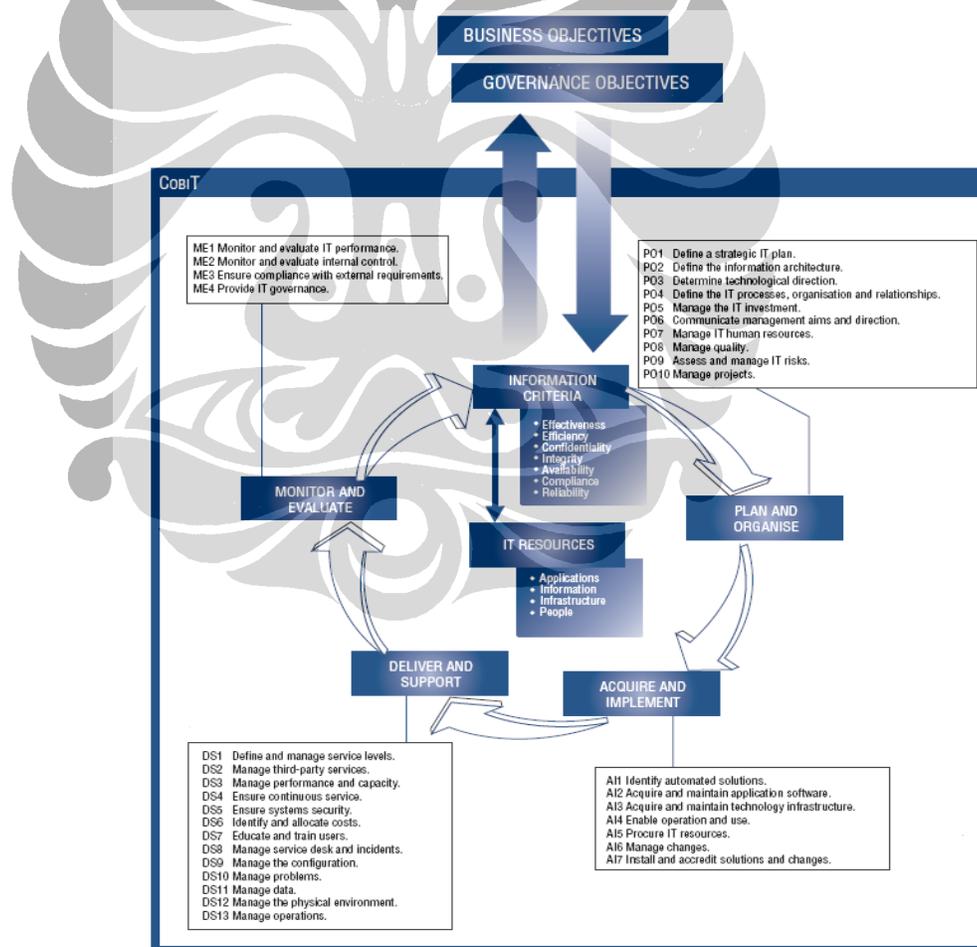
Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) menyediakan sebuah *best practice* yang terdiri dari sebuah domain dan kerangka kerja proses-proses yang disertai aktivitas yang mudah dimanajemen. COBIT sangat kuat didalam pengontrolan. Kerangka

kerja COBIT akan sangat membantu didalam mengoptimalkan investasi TI, memastikan *service ter-delivery* dengan baik dan menyediakan pengukuran untuk menghindari resiko.

COBIT sangat mendukung tata kelola TI dengan menyediakan sebuah kerangka kerja untuk memastikan:

- TI selaras dengan bisnis;
- TI membuat bisnis menjadi mungkin dan memaksimalkan keuntungan;
- Sumber daya TI digunakan dengan penuh tanggung jawab; dan
- Resiko TI dimanajemen dengan baik.

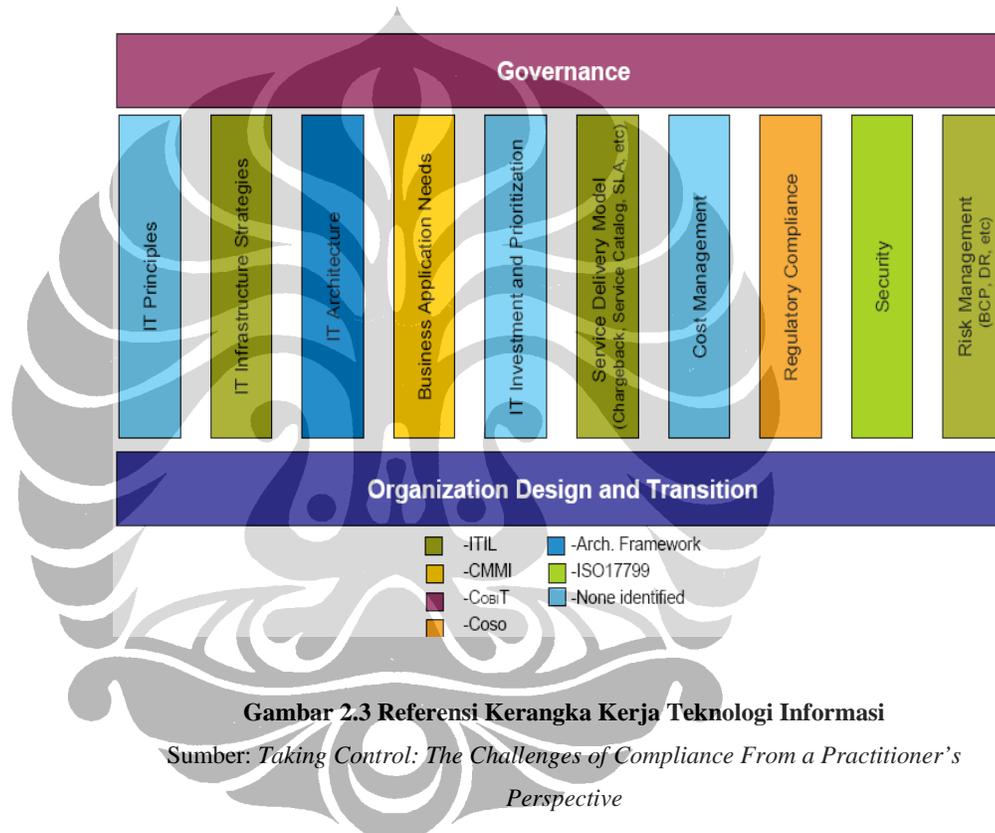
Berikut dapat dilihat kerangka kerja COBIT secara keseluruhan:



Gambar 2.2 Kerangka Kerja COBIT Secara Keseluruhan

Sumber: COBIT Framework 4.1

Bill Boni (2006) menyatakan pembahasan COBIT meliputi pembahasan terhadap *IT Principles*, *IT Infrastructure Strategies*, *IT Architecture*, *Business Application Needs*, *IT Investment and Prioritization*, *Service Delivery Model*, *Cost Management*, *Regulatory Compliance*, *Security*, dan *Risk Management*. Untuk memperjelas bahwa COBIT mempunyai keterkaitan dengan pembahasan diatas berikut dengan kerangka kerjanya, Bill menggambarkan dengan gambar dibawah ini.



2.2 Kepatuhan TI

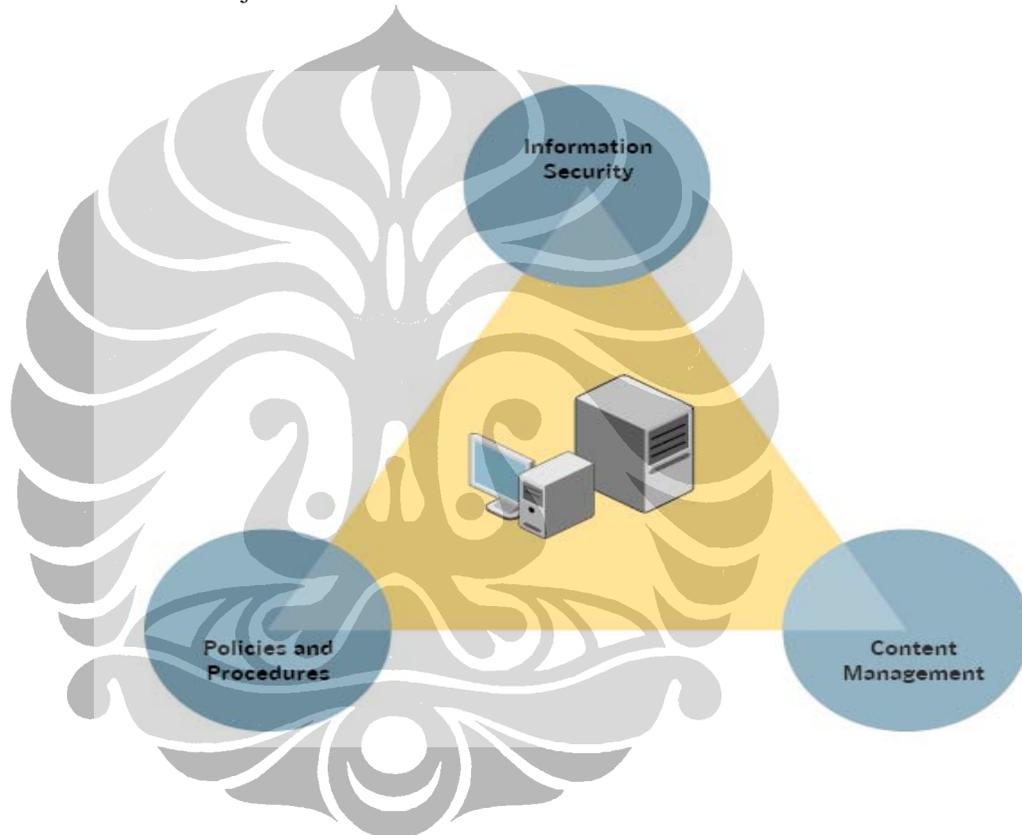
2.2.1 Definisi Kepatuhan TI

Kepatuhan TI adalah sebuah elemen kunci dari salah satu Manajemen Risiko bisnis dan sebuah aspek yang krusial bidang tata kelola *corporate*. Kepatuhan TI merupakan kombinasi kepatuhan terhadap peraturan eksternal, standar industri, kerangka kerja, dan kebijakan internal

perusahaan itu sendiri. Masing-masing peraturan bertujuan untuk menciptakan, mengamankan, perlindungan dan menjaga integritas dari informasi.

Khususnya dibidang finansial, kepatuhan terhadap TI mempunyai tiga komponen kunci yaitu:

- Keamanan Informasi;
- *Content* Manajemen; dan
- Kebijakan dan Prosedur.



Gambar 2.4 Tiga Komponen Kunci Kepatuhan TI

Sumber: *The Role of IT in Achieving Compliance*

Keamanan Informasi

Keamanan informasi merupakan *backbone* dari semua kepatuhan terhadap infrastruktur. Tanpa kontrol keamanan yang efektif, institusi finansial rawan terhadap pencurian informasi terutama data *customer* dan

pelanggaran akses. Pencurian data customer pelanggaran, pencucian uang, dan aktivitas yang janggal dibidang finansial.

Secara aktual, *hacker* akan terus mencari jalan yang baru untuk menyerang sistem, maka untuk itu diperlukan pengontrolan yang kuat dibidang keamanan informasi.

Content Manajement

Content manajement didefinisikan sebagai peng-*index*-an, penyimpanan, dan *retrival* informasi dari bisnis dimana hal tersebut merupakan komponen kritical dan membutuhkan strategi yang baik. *Backup* dan penyimpanan yang baik merupakan salah satu solusi yang efektif. Selain itu pendokumentasian juga termasuk solusi yang efektif.

Kebijakan dan Prosedur

Adanya kebijakan dan prosedur akan mempermudah kontrol dan kenyamanan dalam bekerja. Setiap perubahan yang terjadi diharapkan dapat disosialisasikan dengan baik terhadap karyawan. Partisipasi dari semua bagian di organisasi dalam menentukan kebijakan dan prosedur sangat dibutuhkan untuk membentuk kesamaan persepsi.

2.2.2 Pentingnya Kepatuhan TI

Berdasarkan survey tentang keamanan informasi global yang dilakukan oleh Ernst & Young's pada tahun 2007 dimana yang menjadi objek survey adalah 1300 eksekutif senior dilebih dari 50 negara, menyatakan bahwa kepatuhan adalah pengendali utama dari keamanan dalam berinvestasi TI.

Seiring dengan peraturan-peraturan yang terus berkembang, maka akan ada kemungkinan bahwa kepatuhan terhadap peraturan akan tidak *manage* dengan baik. Apabila hal ini terjadi, maka akan ada efek yang diderita oleh perbankan yaitu *pinalty* finansial, kehancuran reputasi dan adanya kemungkinan kehilangan suatu nilai yang sebenarnya bisa didapat oleh Bank tersebut.

Beberapa standar internasional telah memasukkan kepatuhan TI terhadap peraturan yang berlaku kedalam klausa-klausa yang dibahasnya seperti dibawah:

Tabel 2.1 Standar Internasional Telah Memasukkan Kepatuhan TI

Standar Internasional	Klausa	Kategori	Tujuan
ISO/IEC 17799	15 <i>Compliance</i>	15.1 <i>Compliance with legal requirement</i>	Untuk menghindari pelanggaran terhadap perundangan dan peraturan yang telah ditetapkan.
COBIT 4.1	<i>Monitor and Evaluate</i>	ME3: Ensure <i>Compliance With External Requirement</i>	Memastikan semua proses mematuhi hukum, peraturan-peraturan dan kontrak.

Ada beberapa alasan kenapa kepatuhan TI itu penting, yaitu:

- Membantu memitigasi risiko finansial dari kehilangan atau pencurian data;
- Menurunkan *downtime* proses bisnis akibat risiko TI yang terjadi;
- Dalam pelaporan finansial hanya sedikit bahkan hilang adanya kehilangan data;
- Tingginya proteksi terhadap data; dan
- Mempermudah proses audit dan birokrasi

2.3 Peraturan TI Sektor Perbankan Nasional

Dalam rangka meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan Bank kepada nasabahnya, Bank dituntut untuk mengembangkan strategi bisnis Bank dengan lebih banyak memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi untuk meningkatkan daya saing Bank.

Penerapan Teknologi Informasi telah membawa perubahan dalam kegiatan operasional serta pengelolaan data Bank sehingga dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif serta memberikan informasi secara lebih akurat dan cepat. Perkembangan produk perbankan berbasis teknologi diantaranya berupa *Electronic Banking* memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan secara *non cash* setiap saat melalui jaringan elektronik. Selain itu penggunaan jasa pihak ketiga dalam penyediaan sistem dan pelayanan Bank semakin meningkat pula.

Disamping berbagai manfaat dan keunggulan yang diperoleh dari penggunaan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan kegiatan operasional Bank, terdapat pula risiko yang dapat merugikan Bank serta nasabah seperti risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi selain risiko perbankan lainnya seperti risiko likuiditas dan risiko kredit.

Mengingat bahwa Teknologi Informasi merupakan aset penting dalam operasional yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing Bank sementara dalam penyelenggaraannya mengandung berbagai risiko, maka Bank perlu menerapkan *IT Governance*. Keberhasilan penerapan *IT Governance* tersebut sangat tergantung pada komitmen seluruh unit kerja di Bank, baik penyelenggara maupun pengguna Teknologi Informasi. Penerapan *IT Governance* dilakukan melalui penyelarasan Rencana Strategis Teknologi Informasi dengan strategi bisnis Bank, optimalisasi pengelolaan sumber daya, pemanfaatan Teknologi Informasi (*IT value delivery*), pengukuran kinerja dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif. Untuk dapat menerapkan Manajemen Risiko yang efektif, diperlukan keterlibatan dan pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi, penyusunan dan penerapan kebijakan dan prosedur terkait Teknologi

Informasi, serta proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang berkesinambungan.

Selain itu, kedepan Bank dituntut pula untuk mengantisipasi kebutuhan akan infrastruktur Teknologi Informasi yang memadai dalam rangka menghadapi implementasi *Basel II*. Dengan ketentuan ini, Bank diharapkan mampu mengelola risiko yang dihadapi secara efektif dalam seluruh aktivitas operasional yang didukung dengan pemanfaatan Teknologi Informasi. (penjelasan PBI Nomor: 9/15/PBI/2007). Jadi beberapa dasar pertimbangan peraturan TI disektor perbankan diberlakukan yaitu:

- Perkembangan Teknologi Informasi memungkinkan Bank memanfaatkannya untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan Bank kepada nasabah;
- Penggunaan Teknologi Informasi dalam kegiatan operasional Bank juga dapat meningkatkan risiko yang dihadapi Bank;
- Dengan meningkatnya risiko yang dihadapi, Bank perlu menerapkan Manajemen Risiko secara efektif;
- Teknologi Informasi merupakan aset yang berharga bagi Bank sehingga pengelolaannya bukan hanya merupakan tanggung jawab unit kerja penyelenggara Teknologi Informasi namun juga seluruh pihak yang menggunakannya; dan
- Dalam rangka implementasi *Basel II* diperlukan infrastruktur Teknologi Informasi yang memadai.

Secara garis besarnya, pertimbangan tersebut tetap mengarah pada tata kelola TI yang optimal. Peraturan-peraturan tersebut sengaja diterbitkan untuk menghindari dampak resiko yang fatal yang dapat merugikan pihak *customer*, pihak Bank maupun negara. Sehingga peraturan tersebut harus dipatuhi oleh Bank-Bank yang ada di Indonesia. Peraturan perbankan terbaru yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/15/PBI/2007. Penulis akan mengidentifikasi lebih jauh peraturan-peraturan yang akan digunakan didalam penelitian ini.

Berikut beberapa peraturan TI yang ada di Indonesia:

- Peraturan Bank Indonesia nomor: 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi pengurus dan pejabat Bank umum
- Peraturan Bank Indonesia nomor: 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur
- Peraturan Bank Indonesia nomor: 10/8/PBI/2008 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia nomor 7/52/PBI/2005 tentang penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam penggunaan Teknologi informasi oleh Bank umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/ 8 /PBI/2004 Tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement
- Peraturan Bank Indonesia nomor : 7/18/PBI/2005 tentang sistem kliring nasional Bank Indonesia dan
- Lain-lain

2.4 Kerangka Kerja Kepatuhan TI disektor Perbankan

Kerangka kerja kepatuhan TI disektor Perbankan adalah sebuah kerangka kerja yang bertujuan untuk membantu Perbankan di Indonesia untuk memahami dan mematuhi peraturan yang telah dibuat, baik itu peraturan dari pemerintah ataupun dari Bank Indonesia. Kerangka kerja ini dibuat dari peraturan-peraturan yang telah dibuat di Indonesia terkait dengan TI perbankan. Hal yang mendasari pembuatan kerangka kerja kepatuhan ini adalah:

- Banyaknya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun Bank Indonesia;
- Kurangnya sosialisasi terhadap peraturan yang telah diterbitkan, terutama peraturan yang dibuat oleh pemerintah;
- Adanya sanksi yang dibuat apabila tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Sanksi tersebut dapat berupa teguran sampai dengan denda dan sanksi administrasi lainnya; dan

- Fakta dilapangan bahwa ada sebuah Bank kecil yang sama sekali tidak memiliki *standar operating prosedur* terkait dengan TI yang terdokumentasikan.

Bahan dasar yang digunakan sebagai Masukan dari pembuatan kerangka kerja kepatuhan ini adalah peraturan yang telah diterbitkan dan kerangka kerja COBIT. Dengan adanya kerangka kerja kepatuhan ini, diharapkan:

- Bank dapat mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan;
- Bank dapat memahami risiko lebih awal;
- Bank dapat memigasi risiko lebih awal terutama hal-hal yang terkait dengan sanksi;
- *Awareness* karyawan meningkat;
- Kemudahan membaca peraturan-peraturan yang ditelah diterbitkan; dan
- Memudahkan dalam mengimplementasi peraturan-peraturan tersebut

